



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KOMISI VII DPR RI**

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2016-2017

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2016-2017
16-20 Desember 2016**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 - 2017 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Papua Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tulisan ini berisi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16-20 Desember 2016

1.2. Dasar Kunjungan

Dasar Hukum dari pelaksanaan kunjungan kerja ini adalah Hasil Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

1.3. Maksud dan Tujuan Kunjungan

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan mineral (ESDM), lingkungan hidup (LH) serta riset dan teknologi (Ristek);
- b. Mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di sektor ESDM, LH dan Ristek;
- c. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.

Hasil dari Kunjungan Kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, budgeting dan legislasi untuk bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

1.4. Agenda Pertemuan dalam Kunjungan

Adapun agenda pertemuan pada kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya;

1. Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya dan Unsur Muspida Kabupaten Jeneponto dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke PLTU Punagaya
2. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) dan GM wilayah Sulselrabar PT. PLN (Persero) beserta jajarannya
3. Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan Unsur Muspida serta dihadiri oleh Mitra Komisi VII DPR RI.
4. Pertemuan dengan Dirut PT. Vale Indonesia, Dirut PT. Masmindo Dwi Area, dan Direktur PT. Citra Palu Mineral
5. Pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero) dan GM Wilayah MOR VII PT. Pertamina (Persero) beserta jajarannya dan Direktur PT. Energy Equity Epic (sengkang) Pty. Ltd, Direktur PT. South Sulawesi LNG Keera, Direktur PT. Energy Sengkang Patila, Direktur PT. Energy Equity Epic Sengkang Gilirang
6. Pertemuan dengan Direksi PT. Semen Tonasa beserta jajarannya.

1.5. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berjumlah 16 orang anggota dan dibantu 1 (satu) orang tenaga ahli, 3 (tiga) orang staff sekretariat dan 1 (satu) orang dari tv Parlement

Tabel. Daftar nama tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Pada Reses MP II Tahun Sidang 2016-2017

No	Nama	No.Ang	Fraksi	Jabatan
1	H.Gus Irawan Pasaribu, SE,Ak, MM,CA	A.290	P.Gerindra	Ketua Tim
2	Dr. Ir. Fadel Muhammad	A.317	P.Golkar	Waka Tim
3	Dony Maryadi Oekon	A.167	PDI Perjuangan	Anggota
4	Andi Ridwan Wittiri	A.226	PDI Perjuangan	Anggota
5	Eni Maulani Saragih	A.291	P.Golkar	Anggota
6	Bambang Haryadi, SE	A.367	P. Gerindra	Anggota
7	Eko Wijaya	A.411	P. Gerindra	Anggota
8	Sayed Abubakar A. Assegaf	A.404	P. Demokrat	Anggota
9	H. Totok Daryanto, SE	A.489	PAN	Anggota
10	Dr.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc	A.502	PAN	Anggota
11	H. Agus Sulistyono, ST.MT	A.61	PKB	Anggota
12	H. Rofi Munawar, Lc	A.115	PKS	Anggota
13	Tamsil Linrung	A.121	PKS	Anggota
14	Dr. Andi Jamaro Dulung, M.Si	A.542	PPP	Anggota
15	dr. Ari Yusnita	A.31	P.Nasdem	Anggota
16	Muktar Tompo, S.Psi	A.560	P.Hanura	Anggota

BAGIAN II

PROFIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Profile Singkat Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi selatan mempunyai luas wilayah seluas 45.764,53 km persegi dengan memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0 12' - 8 lintang selatan dan 116'48 - 122' 36' Bujur Timur, dengan batas wilayahnya meliputi : Provinsi Sulawesi selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan teluk bone serta provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur serta sebelah barat dan timur masing-masing dengan selat Makassar dan laut flores



Gambar ; Peta Provinsi Sulawesi Selatan

2.2. Demografi

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2015 totalnya mencapai 8.520.304 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 4.160.975 jiwa, Perempuan sebanyak 4.359.329 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 95,45%. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Makassar sebanyak 1.449.401 jiwa dan yang paling sedikit berada di kabupaten kepulauan selayar sebanyak 130.199 jiwa

2.3. Kondisi Geologis

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam Provinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier.

Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981). Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Patti, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa).

2.4. Kondisi Iklim

Suhu udara Sulawesi Selatan pada tahun 2015 berada pada kisaran 22,07-35,03°C dengan kelembaban udara 44,33-97,33 %. Sedangkan kecepatan angin berkisar 2-6 knots dengan tekanan udara 1011,57-1013,70 mb. Keadaan cuaca atau iklim ini membuat Sulawesi Selatan relatif lebih panas dari tahun kemarin. Berdasarkan pengamatan di tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2015 rata-rata suhu udara 27,52 °C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,93 °C dan suhu minimum 22,80 °C.

2.5. Kondisi Topografi dan Hidrologi

Wilayah Sulawesi selatan membentang mulai dari daratan rendah hingga dataran tinggi. Kondisi kemiringan tanah 0-3% merupakan tanah yang relative datar, 3-8% merupakan tanah relative bergelombang, 8-45% merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45% tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 400 hingga 1000 meter dpl. Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

2.6. Potensi Sumber Daya Pertambangan

Adapun potensi daerah Sulawesi selatan dari sektor pertambangan tersebar di beberapa Kabupaten/kota yaitu:

- Marmer di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bone.
- Nikel dan Laterit besi di Kabupaten Luwu Timur.
- Bijih Besi di Kabupaten Bone, Luwu Timur.
- Timah Hitam di Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, dan Gowa
- Emas di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Maros, Gowa, Bulukumba dan Sinjai.
- Mangan di Kabupaten Bone dan Barru

BAGIAN III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI memulai kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada tanggal 16 Desember 2016. Sesampainya di Bandara Sultan Hasanuddin Maros-Makassar Sulawesi Selatan, tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Jeneponto. Sesampainya di Kabupaten Jeneponto, tim Kunker Komisi VII DPR RI diterima oleh H. Iksan Iskandar (Bupati), Mulyadi Mustamu Kr. Tinggi (wakil Bupati) dan unsur pimpinan SKPD se Kabupaten Jeneponto. Sedangkan tim Komisi VII DPR RI di dampingi oleh beberapa mitra kerja diantaranya; M.R. Karliansyah (Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK), Rini Setyorini (Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas KESDM), Prof. Wimpie Agoeng Noegroho (Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Pengembangan Bidang SDA), Agus Haryono (Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI), Muliawan (Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas), Machnizon Masri (Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero)), Tengku Badarsyah (GM MOR VII Wilayah Sulawesi PT. Pertamina). Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari BPOM, Pusat Studi Lingkungan Hidup UNHAS, dan Walhi. Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa hal diantaranya potensi daerah dan pengembangannya, masalah kelistrikan, pengembangan Migas di blok karaengta, kasus keracunan kerang akibat pencemaran laut. Selain itu dilakukan penandatanganan MoU antara Pemda kabupaten Jeneponto dengan LIPI untuk mengembangkan potensi daerah. Pada saat Setelah pertemuan dengan Bupati Jeneponto di ruang pertemuan rumah jabatan, tim Kunker Komisi VII DPR RI selanjutnya melakukan peninjauan lapangan ke PLTU Punagaya untuk melihat sejauhmana upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Didalam peninjauan lapangan tersebut Tim Kunker Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dan membahas masalah pengelolaan limbah, dan tenaga kerja asing. Setelah peninjauan lapangan ke PLTU Punagaya, tim komisi VII selanjutnya kembali ke Makassar untuk melakukan pertemuan dengan jajaran PT. PLN (persero). Pada pertemuan dengan jajaran PT. PLN (Persero) yang berlangsung di Hotel Swissbell Losari dihadiri oleh

Machnizon Masri (Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero)), Wasito Adi (GM Sulselrabar PT. PLN (persero)) beserta jajarannya. Pada pertemuan tersebut membahas kondisi sistem kelistrikan Sulselrabar, masalah biaya pokok penyediaan (BPP) kelistrikan, penyediaan rencana pembangunan pembangkit dan transmisi serta progress pembangunan PLTM IPP, perbedaan data pelanggan bersubsidi antara PT. PLN dengan data TNP2K dan sebagainya.

Pada esok harinya di agendakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Namun ketika tim Kunker Komisi VII DPR RI telah sampai ke kantor Gubernur, ternyata hanya di terima oleh H. Jufri Rahman (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan), sehingga Gus Irawan Pasaribu (ketua tim Kunker dan sekaligus merupakan Ketua Komisi VII DPR RI) berdasarkan kesepakatan dengan anggota tim kunker Komisi VII DPR RI lainnya bersepakat untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi selatan.

Pada siang harinya Tim Kunker Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Nico Kanter (Dirut PT. Vale Indonesia), Boyke P Abidin (Dirut PT. Masmindo Dwi Area), Ahmad Musadik (.PT.Citra Palu Minerals). Pada pertemuan tersebut hadir pula, Moch Hidayat (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba KESDM), Sigit Reliantoro (Setdirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK). Pada pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Swissbell Losari membahas antara lain pemmasalahan sektor pertambangan di Sulawesi selatan, rencana pengembangan masing-masing perusahaan KK, kontribusi sektor pertambangan dan sebagainya. Setelah pertemuan dengan beberapa perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya, tim Kunker Komisi VII DPR RI selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran PT. Pertamina (Persero). Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh I Gusti Nyoman Wiratmadja (Dirjen Migas KESDM), perwakilan SVP PT. Pertamina (Persero), Muliawan (Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas), Tengku badarsyah (GM MOR VII Wilayah Sulawesi PT. Pertamina (Persero), Presiden PT.Energi Equity Epic Sengkang Pty.Ltd. Pada pertemuan tersebut membahas tentang penyaluran BBM dan LPG PSO dan Non PSO, kontribusi CSR dan PKBL termasuk PBBKB, produksi gas di Sulawesi selatan termasuk pemanfaatannya dan pengembangan kegiatan eksplorasi migas di Sulawesi Selatan serta berbagai permasalahan lainnya.

Selanjutnya, sebagai penutup dari rangkaian kegiatan Kunker Komisi VII DPR RI, dilakukan pertemuan dengan jajaran PT. Semen Tonasa (Persero) di Kabupaten Pangkep. Pada pertemuan tersebut, tim Kunker Komisi VII DPR RI diterima oleh Andi Unggul Attas (Dirut) beserta jajaran direksi dan staf. Pertemuan tersebut membahas tentang kegiatan pengelolaan lingkungan dan masalah sulitnya memperoleh pasokan batubara. Setelah pertemuan dengan jajaran direksi PT. Semen Tonasa (Persero) selanjutnya tim Kunker Komisi VII DPR RI langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin Maros-Makassar untuk kembali ke Jakarta.

BAGIAN IV

HASIL KUNJUNGAN KERJA

4.1. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada pelaksanaan kunjungan kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2016, terdapat beberapa informasi dan temuan yang diperoleh oleh tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, antara lain:

Sektor Ketenagalistrikan

- Wilayah Sulselrabar memiliki total luas wilayah 100.652 km². Adapun realisasi jumlah pelanggan, penjualan dan beban puncak per nopember 2016 adalah untuk jumlah pelanggan mencapai 2.473.972 pelanggan atau meningkat sebesar 7,19% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.336.563 pelanggan. Sedangkan untuk penjualan tenaga listrik mencapai 5.510.629 MWh atau meningkat sebesar 7,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.414.000 MWh dan untuk beban puncak sebesar 1.211 MW atau meningkat sebesar 11.92% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.092MW. Untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan, wilayah Sulselrabar saat ini memiliki infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari transmisi sepanjang 2.897 kms, kapasitas trafo 1.988,5 MVA, jumlah trafo 69 unit, Gardu Induk (GI) sebanyak 39 unit dan jumlah tower sebanyak 3.986 buah.
- Saat ini Rasio Elektrifikasi untuk wilayah Sulawesi selatan sebesar 94,10%, dimana jumlah daya terpasang sebesar 1.335,0 MW, daya mampu 1.101,5 MW, beban puncak sebesar 1.012,8 MW. Sehingga masih terdapat surplus sebesar 88,7 MW. Namun jumlah cadangan yang dimiliki masih <30% sehingga belum relatif aman untuk menghindari terjadinya pemadaman
- Adapun komposisi energi tiap pembangkit untuk wilayah Sulselrabar pada tahun 2016 (per nopember 2016) masih didominasi dengan penggunaan batubara yang mencapai 31,98%, kemudian penggunaan gas sebesar 25,63%, Air sebesar 28,36%, HSD 9,69%, MFO 2,67%, Biodiesel 1,66%, dan yang terkecil energi surya sebesar 0,01%
- Biaya pokok Penyediaan (BPP) untuk wilayah Sulselrabar masih lebih tinggi dari harga jual rata-rata. Per-nopember 2016, BPP mencapai Rp.1.431 per kWh sedangkan harga jual rata-rata mencapai Rp. 955 per kWh. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 476 per kWh. Hal ini tentunya berakibat masih tingginya biaya subsidi yang harus dibayarkan pemerintah, untuk menjaga agar PT. PLN (persero) dapat terus beroperasi dalam menyediakan pasokan listrik ke masyarakat.
- Komposisi pelanggan per nopember 2016 untuk wilayah Sulselrabar masih didominasi oleh pelanggan rumah tangga yang mencapai 2.293.056 pelanggan (93%) disusul kemudian sektor Bisnis sebanyak 118.657 pelanggan (5%), sektor sosial 43.361 pelanggan (2%), Pemerintahan 16.980

pelanggan, sektor Industri 1.902 pelanggan, dan sektor layanan khusus sebanyak 16 pelanggan. Dari jumlah pelanggan persektor tersebut, komposisi penjualan didominasi oleh rumah tangga sebesar 3.025 GWh (55%), Bisnis sebesar 1.084 GWh (20%), Industri sebesar 872 GWh (16%), Pemerintahan 292 GWh (5%), Sosial 220 GWh (4%), dan layanan sosial sebesar 18 GWh.

- Terdapat perbedaan data jumlah pelanggan bersubsidi antara PT. PLN dengan data TNP2K. Khusus untuk wilayah Sulawesi selatan, data PT. PLN mencatat jumlah total pelanggan bersubsidi sebesar 1.413.797 yang terdiri dari pelanggan R1 450 VA sebanyak 514.283 pelanggan dan pelanggan R1 900 VA sebanyak 899.514 pelanggan. Sedangkan data TNP2K terdapat pelanggan yang layak disubsidi versi pemerintah sebesar 243.782 pelanggan yang terdiri dari pelanggan daya 900 VA sebesar 197.896 pelanggan dan diluar daya 900 VA sebesar 45.886 pelanggan. Berdasarkan data PT. PLN dan TNP2K tersebut maka terdapat sekitar 701.618 pelanggan 900 VA yang akan dimigrasi ke daya non subsidi.
- Adapun progress saat ini pembangunan PLTM IPP tersebar di wilayah Sulselrabar adalah; yang telah beroperasi 36,9 (13%), konstruksi 23,5 (8%), proses PPA 10 (4%) dan proposal sebanyak 207,8 (75%). Sedangkan untuk pengembangan pembangkit EBT yang telah tandatangan PPA yaitu:

Tabel; progres pembangunan PLTM IPP

No	Jenis	Nama Project	Kapasitas (MW)	Estimasi COD	Keterangan
1	PLTB	PLTB Sidrap	52	2018	Proses Konstruksi
2	PLTB	PLTB Jeneponto	60	2018	Sudah ada PPA
3	PLTA	Malea	90	2021	Sudah ada PPA

Sumber; bahan presentasi PT.PLN (Persero), 16 Desember 2016

- Berdasarkan hasil monitoring terhadap rencana pembangunan transmisi dan gardu induk. Di wilayah Sulselrabar terdapat beberapa kendala yang tentunya akan menghambat pembangunan transmisi dan gardu induk. Untuk itu PT. PLN (Persero) telah melakukan upaya tindaklanjut. Beberapa proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang meghadapi kendala dan telah dilakukan upaya tindaklanjut diantaranya:

Tabel; permasalahan Pembangunan transmisi dan tindaklanjutnya

No	Proyek	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	T/L 150 kV Malili-Lasusua Section 1	1. Finansial bermasalah 2. Masuk kawasan hutan (29 TIP) 3. Beberapa lahan belum bebas (17 TIP)	1. Menambah konsorsium dan pembayaran MOS 85% 2. Koordinasi dengan TP4D dan dinas terkait 3. Konsinyasi dengan TP4D
2	T/L 150 kV Malili-Lasusua Section 2	Finansial bermasalah	Diterminasi dan kontrak ulang/Swakelola
3	T/L 150 kV Malili-Lasusua Section 3	4. Terdapat beberapa lahan belum bebas (3 TIP) dan bermasalah (4 TIP)	1. Koordinasi dengan TP4D dan dinas terkait 2. Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan

		5. Material FIA belum on site	material
4	T/L 150 kV Malili-Lasusua Section 4	Finansial bermasalah	Pembayaran MOS 95%
5	T/L 150 kV Lasusua-Kolaka Section 1	1. Sisa material belum on site (16 tower) 2. Apraisal harga KJPP belum terbit	1. Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material 2. Meminta hasil-hasil apraisal dari KJPP (UIP)
6	T/L 150 kV Lasusua-Kolaka Section 2	1. Sisa material belum on site (3 tower) 2. Apraisal harga KJPP belum terbit	1. Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material 2. Meminta hasil-hasil apraisal dari KJPP (UIP)
7	T/L 150 kV Lasusua-Kolaka Section 3	1. Beberapa lahan belum bebas (47 TIP) 2. Sisa material tower belum on site	1. Negosiasi dengan pendampingan TP4D 2. Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material
8	T/L 150 kV Kolaka-Unaaha Section 1	Masuk kawasan hutan produksi (10 TIP)	Koordinasi dengan TP4D dan dinas kehutanan setempat
9	T/L 150 kV Kolaka-Unaaha Section 2	Sisa material tower belum on site (19 tower)	Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material
10	T/L 150 kV Unaaha-Kendari Section 1	Sisa material belum on site (19 tower)	Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material
11	T/L 150 kV Unaaha-Kendari Section 2	1. Masuk kawasan hutan (5 TIP) dan tanah Pemda (2 TIP) 2. Material belum on site	1. Koordinasi dengan TP4D dan dinas terkait 2. Mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material

Sumber; bahan presentasi PT.PLN (Persero), 16 Desember 2016

Tabel; permasalahan Pembangunan Gardu Induk dan Tindak lanjutnya

No	Proyek	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Gardu Induk 150 kV Lasusua (new)	Finansial bermasalah	Menambah konsorsium Elmek dan koordinasi dengan TP4D
2	Gardu Induk 150 kV Kolaka (new)	Finansial Bermasalah	Menambah konsorsium Elmek dan koordinasi dengan TP4D
3	Gardu Induk 150 kV Unaaha (new)	Komisioning belum bisa dilakukan	Menunggu penyelesaian transmisi
4	Gardu Induk 150 kV Kendari (new)	Finansial Bermasalah	Eskalasi

Sumber; bahan presentasi PT.PLN (Persero), 16 Desember 2016

- Realisasi Lises per oktober 2016 untuk wilayah Sulselrabar adalah masih sangat rendah yaitu 40,70%, dengan perincian sebagai berikut..

Tabel; Realisasi Lides 2016

Uraian Kegiatan	Sat.	Komitmen Kontrak		Realisasi		Persen
		Fisik	Biaya	Fisik	Biaya	
Gardu Distribusi	MVA		39.834.233.283		26.907.852.895	67.55%
JTM	KMS		241.471.601.135		76.234.163.598	31.57%
JTR	KMS		61.430.299.550		36.339.793.006	59.16%
Pembangkit	kW					
Program "Listrik Murah & Hemat	RTS					
Total			342.736.133.968		139.481.809.499	40.70%

Sumber; bahan presentasi PT.PLN (Persero), 16 Desember 2016

- Terkait beroperasinya PLTU Jeneponto, saat ini dalam melaksanakan operasinya telah memanfaatkan beberapa perusahaan lokal penunjang dengan jumlah total tenaga kerja yang terserap mencapai 403 pekerja. Dari total 403 pekerja tersebut, pekerja ekspatriat berjumlah 51 (12,66%) pekerja, Luas Sulsel berjumlah 14 (3,47%) pekerja, Sulsel non jeneponto 31 (7,69%) pekerja dan yang berasal dari Jeneponto berjumlah 307 (76,18%) pekerja

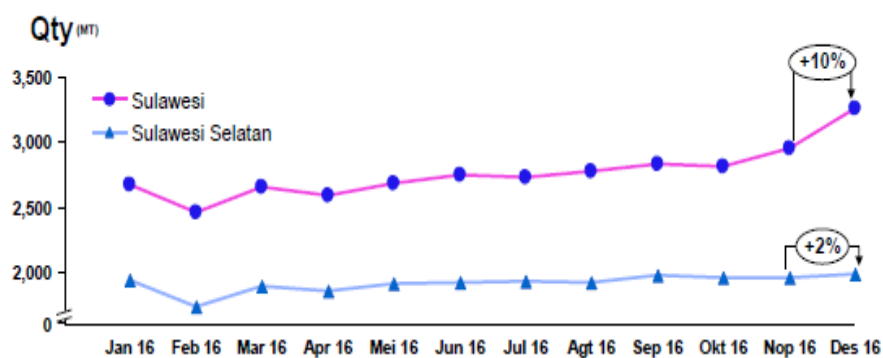
Sektor Migas (Hulu-Hilir)

Sedangkan pada sektor Migas di Provinsi Sulawesi Selatan, informasi dan temuan oleh tim Kunker Komisi VII DPR RI, antara lain:

- Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII membawahi kegiatan operasional Pertamina di seluruh area Sulawesi. Kantor Unit MOR VII berada di Kota Makassar, yang merupakan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Serta merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan operasional MOR VII meliputi penjualan BBM retail, BBM industri, avtur, LPG, pelumas dan aspal dengan total lembaga penyalur sebanyak lebih dari 900 lembaga penyalur. Dalam menjamin ketahanan supply di Sulawesi, MOR VII memiliki 17 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), 7 Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU) dan 2 Depot LPG.
- Tantangan yang di hadapi oleh MOR VII Wilayah Sulawesi dalam mensuplai BBM diantaranya adalah faktor medan distribusi yang menantang dimana jarak tempuh sampai dengan 450 km dengan jalan berliku dan berbukit. Selain itu potensi longsor di perjalanan dapat menghambat kelancaran pendistribusian. Kendala lainnya adalah masalah alam dimana pendistribusian BBM dengan menggunakan moda transportasi laut terkadang terkendala oleh pengaruh cuaca, seperti ketinggian ombak yang mencapai 2 meter.
- Quota BBM PSO tahun 2016 untuk wilayah Sulawesi Selatan, untuk premium sebesar 1.054.853 L atau 46% dari total quota wilayah Sulawesi yang mencapai 2.281.893 L. Untuk Solar sebesar 571.539 L atau 51% dari total quota yang mencapai 1.114.895 L. Sedangkan untuk kerosene dari total quota sebesar 105.495 L untuk wilayah Sulawesi, Sulawesi selatan

tidak mendapatkan quota. Adapun realisasi per november 2016 di Sulawesi selatan untuk jenis Premium baru mencapai 868.899 L (82%) sedangkan realisasi Solar baru mencapai 368.817 L (65%).

- Realisasi penyaluran BBK dan BBM non PSO dari bulan Januari hingga Nopember 2016 adalah; untuk jenis Pertalite di wilayah Sulawesi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 2.351 KL pada Januari 2016 menjadi 46.185 KL pada Nopember 2016 atau terjadi peningkatan sebesar 24%. Sedangkan untuk jenis lainnya seperti Pertamina dari 4.167 KL menjadi 7.148 KL, Pertamina Turbo dari 32 KL menjadi 48 KL, dan Pertamina Dex dari 54 KL menjadi 67 KL.
- Quota penyaluran LPG PSO khusus Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 248.459 MT atau di prediksi mengalami penurunan berdasarkan prognosa 2016 sebesar 225.737 MT atau turun sekitar 9%. Sedangkan quota nopenber 2016 sebesar 227.754 MT dengan realisasi sebesar 205.305 MT atau mengalami penurunan sebesar 10% . Menurunnya realisasi dibandingkan quota LPG PSO tahun 2016 dikarenakan penyaluran LPG 3Kg yang lebih terkendali dan adanya peningkatan kedisiplinan dari agen PSO dalam hal administrasi (logbook) sebagai bagian dari monitoring pendistribusian LPG PSO.
- Realisasi penyaluran LPG non PSO 2016 (LPG 12 Kg, LPG 50 Kg, Bulk dan Bright Gas (12 Kg dan 5,5 Kg) untuk wilayah Sulawesi dan Sulawesi selatan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan pelaksanaan konversi dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan LPG



Gambar: Realisasi LPG non PSO 2016

- Kontribusi PBBKB Sulawesi Selatan dalam 3 bulan terakhir mengalami fluktuatif. Pada bulan september mencapai Rp. 40.368.917.027,-, dan meningkat pada bulan oktober menjadi Rp. 41.676.997.373,- kemudian mengalami penurunan pada bulan berikutnya yaitu Nopember menjadi Rp. 40.733.512.446,-. Sedangkan untuk penyaluran Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan+CSR mencapai Rp.6.874.000.000,- dan Rp. 13.891.720.581,-
- PT. Energy Equity Epic Sengkang Pty.Ltd (PT.EEES), memiliki luas area 5.697,2 km² (awal) dan tersisa saat ini 2.925,23 km². PT. EEES menandatangani PSC pada 24 Oktober 1970, selanjutnya diperbaharui pada

07 Oktober 2005. Kontak PSC PT. EEES akan berakhir pada 23 Oktober 2022. Adapun data wilayah Kerja PT.EEES adalah;

Tabel; tabel produksi gas PT. EEES

No	KKKS	WK	Lap.	Jenis POD	Per setujuan	Lokasi	Target Onstream (POD)	Estimasi Kumulatif Produksi		
								Minyak +Cond, MMBBL	Gas, BCF	LPG, MMBBL
1	PT.EEES	Sengkang	Kampung Baru	POFD	16 Nov 2010	Sulsel	Q1 2012	-	110,35	-
2	PT.EEES	Sengkang	Walanga, sampi-sampi & bongge	POD	14 Juni 2011	Sulsel	2012	-	136,33	-

Sumber; bahan presentasi SKK Migas

- Data produksi Gas Bumi Provinsi Sulawesi selatan yang di dihasilkan oleh PT. EEES pada tahun 2015 rata-rata sebesar 47,35 Mmscfd, sedangkan produksi rata-rata hingga oktober 2016 sebesar 43,26 Mmscfd. Adapun pemanfaatan gas dari lapangan PT. EEES dari januari hingga 31 Oktober 2016 yaitu;

Tabel; Pemanfaatan gas PT. EEES

No	KKKS	Pembeli Gas	Pemanfaatan	Volume (BBTUD)	Jangka Waktu	Realisasi (BBTUD)
1	PT. Energy Equity Epic	PT.EEES	Kelistrikan IPP	40	2022	33.31
2	Sengkang Pty Ltd	PT. PLN	Kelistrikan	15	2022	10.66
3		PT. Wajo Energy Jaya	Kelistrikan	4	2022	Not Yet Onstream
4		PT. Pertamina	Jaringan Gas Kota	0.5	5 Thn	0,18

Sumber; bahan presentasi SKK Migas

Sektor Pertambangan Minerba

Pada sektor pertambangan, terdapat beberapa informasi penting yang diperoleh oleh tim kunker Komisi VII DPR RI, diantaranya;

- Terdapat beberapa permasalahan usaha pertambangan yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:
 - Pelepasan hak kepemilikan lahan yang masuk dalam WIUP
 - Proses pinjam pakai kawasan hutan VS jangka waktu IUP.
 - Lokasi WUP kerap bertumpang tindih dengan sektor lain.
 - Rendahnya penataan terhadap UU oleh para pemegang IUP.
 - Pemerintah Pusat perlu segera memperbaharui UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba karena sudah tidak sejalan dengan UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Pengawasan Tambang kurang efektif karena status kepegawaian Inspektur Tambang belum jelas dari Pemerintah Pusat (KESDM dan Kemen PAN).
- Adapun Produksi bahan tambang tahun 2016, di Provinsi Sulawesi selatan dari berbagai komoditas pertambangan adalah:

Tabel; Produksi tambang Sulawesi selatan 2016

No.	Bahan Tambang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Nickel Matte	57.999,96	ton	September
2	Marmer	24.613,67	M ³	November
3	Batukapur	7.490.847,03	ton	Oktober
4	Tanah Liat	1.922.127,69	ton	Oktober
5	Batubara	7.724,79	ton	September

Sedangkan penerimaan berupa PNBPN pertambangan sampai triwulan ke-IV 2016, mencapai Rp.128.786.183.920,-

Tabel: penerimaan Prov. Sulawesi selatan sektor pertambangan

No.	Penerimaan	Januari-November (Rp)
1	Iuran Tetap	6.132.472.956,00
2	Royalti	122.653.710.964,00
3	Penjualan hasil tambang	-
4	Jumlah	128.786.183.920,00

Dimana Provinsi Sulawesi selatan memperoleh dana bagi hasil sebesar 80% atau sekitar Rp. 103.028.947.136,-

Sedangkan terhadap perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK), terdapat beberapa informasi yang diperoleh diantaranya;

a. PT. Vale Indonesia Tbk.

- PT Vale adalah perusahaan pertambangan nikel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang memiliki lokasi KK di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Adapun komposisi kepemilikan saham saat ini yaitu Sumitomo Metal Mining 20,09%, Vale Canada Limited 58,73%, Publik 20,49% dan lain-lain sebesar 0,69%.
- Sekitar 60% produsen nikel (Ni) mengalami arus kas negatif pada harga Ni saat ini. Biaya operasi 50%, berarti 50% dari produsen Ni dapat memproduksi dengan arus kas positif pada harga Ni ini



Gambar; harga Nikel Vs biaya operasi

Upaya PT. Vale Indonesia yang telah dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasi perusahaan diantaranya; Hiring, salary dan bonus freeze (sampai saat ini PT Vale tetap berupaya untuk tidak melakukan PHK karyawan), Memangkas *budget* atau mendelay kegiatan-kegiatan yang tidak kritikal dan masih bisa menunggu, Memprioritaskan penggunaan internal resources, Merenegosiasikan kontrak-kontrak yang ada, Tidak membagi dividen, dan Meninjau kembali strategi investasi supaya lebih efisien dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

- Asumsi keuangan PT Vale Indonesia terhadap realisasi tahun 2016 dan rencana tahun 2017 adalah sebagai berikut

Tabel; Realisasi keuangan dan rencana 2017 PT. VI

KETERANGAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	% REALISASI TERHADAP RENCANA TAHUN 2016	% RENCANA TAHUN 2017 TERHADAP REALISASI TAHUN 2016
	RENCANA	REALISASI	RENCANA		
	1	2	3		
Volume Penjualan (Tonase)	81,390	57,287	83,734	70%	146%
Harga Jual (AS\$/Kg)	6.63	7.04	8.19	106%	116%
Harga Beli BBM (dalam ribuan AS\$)	99,053	61,883	112,834	62%	182%
Nilai Kurs	13,620	13,087	13,895	96%	106%
Royalti (dalam ribuan AS\$)	10,792	8,109	13,716	75%	169%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terjadi penurunan royalty dari rencana tahun 2016 sebesar USD 10.792.000,- menjadi hanya USD 8.109.000,-

- Jumlah tenaga kerja PT. Vale Indonesia saat ini berjumlah 3.013 orang yang terdiri dari Karyawan Lokal sebanyak 2.578 orang (86,6%), Karyawan Non Lokal sebanyak 435 orang (13,4%) dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 8 orang (0,3%). Sedangkan tenaga kerja yang terserap akibat aktivitas PT. Vale Indonesia yang berasal dari kontraktor berjumlah 2.291 orang yang terdiri dari Karyawan Kontraktor Lokal sebanyak 1.942 orang (84,8%), Karyawan Kontraktor Non Lokal sebanyak 349 orang (15,2%) dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 21 orang (9,2%). Adapun proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara adil dan transparan dan lowongan tenaga kerja local di 4 area pemberdayaan dan Luwu Timur menjadi prioritas, jika tidak diperoleh calon pekerja, baru kemudian dibuka di Sulsel sebelum dibuka di nasional..
- PT. Vale Indonesia merencanakan untuk melakukan investasi di 3 provinsi. Investasi tersebut merupakan bagian yang penting dalam program Pemerintah untuk peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri. Investasi tersebut berupa; Ekspansi smelter Sorowako. Peningkatan produksi 25%, sampai 90.000 t Ni per tahun, Pembangunan pabrik HPAL

di Pomalaa untuk mengolah limonit, dan juga opsi pengolahan saprolit, Pembangunan pabrik FeNi di Bahodopi dengan kapasitas >15.000 t per tahun.

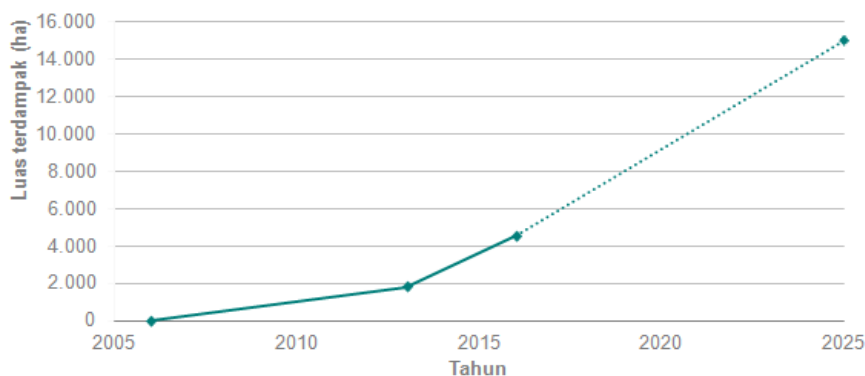
- Kebutuhan kawasan hutan untuk mendukung operasi saat ini dan rencana investasi yaitu;

Tabel; kebutuhan IPPKH dan biaya investasi

Lokasi	Luas (ha)	PSDH (A\$)	DR (A\$)	Nilai tegakan (A\$)	PNBP (A\$ per tahun)
Sorowako	16.954	584.131	1.631.831	682.051	730.719
Bahodopi	4.759	236.818	661.575	276.517	71.241

Luas wilayah untuk IPPKH operasi produksi sesuai FS yang telah disetujui Pemerintah. Kebutuhan wilayah untuk investasi belum termasuk Bahodopi dan Pomalaa. IPPKH eksplorasi di Bahodopi dan Pomalaa telah diperoleh pada tahun 2014, dan IPPKH eksplorasi di Sorowako telah diperoleh pada tahun 2016. Untuk itu PT. Vale Indonesia berharap luas kawasan hutan yang diajukan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Dan PT. Vale Indonesia memahami pentingnya fungsi hutan sehingga berkomitmen untuk melakukan penambangan dengan kaidah “*Good Mining Practice*”.

- Besarnya kebutuhan luas IPPKH PT. Vale Indonesia dipegaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; Tingkat produksi yang besar dan terus meningkat, Profil bijih yang dangkal, tipis dan tersebar tidak merata, Kebutuhan spesifikasi bijih yang ketat untuk diolah di smelter, Tingkat ketidakpastian kuantitas dan kualitas bijih, Operasi terintegrasi dengan infrastruktur yang lengkap (PLTA, jaring transmisi, pipa minyak, pelabuhan udara/laut, jalan, perumahan, rumah sakit, dll), dan hingga saat ini, kami sudah membuka wilayah hutan seluas 5.000 ha untuk kegiatan operasi kami, yang juga termasuk dalam permohonan IPPKH
- Perambahan hutan sedang terjadi pada skala besar dan mengancam ekosistem danau dan diperkirakan luas kerusakan kawasan hutan akan mencapai 15.000 ha pada tahun 2025.



Gambar. Potensi kerusakan hutan disekitar wilayah tambang PT.VI

Dengan diberikannya PT. Vale Indonesia IPPKH akan membantu mengurangi kerusakan kawasan hutan mengingat; dengan adanya IPPKH maka PT. Vale berkewajiban untuk turut menjaga kawasan hutan yang tercakup dalam izin, PT. Vale Indonesia juga berkewajiban membayar PNBP, yang dapat digunakan untuk program pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan PT. Vale Indonesia akan berkewajiban melakukan penghijauan kembali

- Terkait adanya proses revisi UU Minerba yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan penyusunan di Komisi VII DPR RI. Maka PT. Vale Indonesia mengusulkan beberapa hal diantaranya; Pemerintah perlu konsisten menerapkan kewajiban pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri, tanpa relaksasi., Revisi UU dapat memperkuat tanggung jawab Pemerintah dalam memberi insentif., IUP dan IUPK diperkuat sebagai izin tunggal., Kewajiban keuangan pemegang IUP dan IUPK dilindungi dari pengenaan kewajiban tambahan yang memberatkan. Terkait rencana pemberian relaksasi ekspor, PT. Vale Indonesia menganggap justru akan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Tabel; potensi kerugian negara jika menerapkan relaksasi

Pendapatan	2017	2018
Tanpa Relaksasi	\$2.204.400.000	\$3.442.500.000
Jika relaksasi namun tidak berpengaruh ke harga Ni	\$1.989.900.000	\$2.261.250.000
Jika relaksasi dan ada pengaruh ke harga Ni	\$1.447.200.000	\$1.447.200.000

b. PT. Masmindo Dwi Area

- PT. Masmindo Dwi Area (PT.MDA) merupakan perusahaan pemegang KK generasi VII, berdasarkan Kepres No. B.53/Pres/1/1998 pada tanggal 19 Januari 1988, dengan luas wilayah awal 83.440 Ha. Dalam melaksanakan kegiatannya PT. MDA telah 4 kali mendapatkan perpanjangan studi kelayakan dari Menteri ESDM RI. Pada tahun 2015 PT.MDA mengajukan penundaan kegiatan di wilayah KK dan mendapat persetujuan dari Dirjen Minerba ESDM berdasarkan surat No. 589/30/DJB/2016 pada tanggal 15 April 2016. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, PT. MDA memiliki propek sumber daya terukur sebagai berikut;

Tabel; prospek Sumber daya emas PT. MDA

Prospek Area	MT	Grade g/t Au	Logam Au Juta oz
Awak Mas	47,1	1,4	2,12
Salu Bulo	6,1	2,1	0,41
Tarra (Belum dilakukan audit verifikasi)	7,37	1,25	0,297
Total	60,57	4,75	2,827

Dengan sumberdaya terukur yang dimiliki dan harga emas yang tinggi, direncanakan PT. MDA akan melaksanakan kegiatan Operasi Produksi pada tahun 2018.

- Walaupun belum Operasi Produksi, PT. Masmindo Dwi Area telah merealisasikan program pengabdian masyarakat hingga tahun 2016 berupa CSR, dan Comdev sebesar Rp. 1.233.795.700,-. Adapun pelaksanaan program CSR dan Comdev yang telah dilaksanakan berupa; Pembangunan gedung sekolah dasar, Pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin dan nutrisi gratis bagi ibu hamil serta anak-anak, Partisipasi perbaikan jembatan s.bajo, Pembuatan jembatan beton permanen pada jalur utama di jalan perintis, Partisipasi dalam perbaikan dan peningkatan mutu prasarana transportasi di desa Salubulo, Partisipasi meningkatkan mutu kesehatan dengan membangun sarana sanitasi, Pemberian sumbangan bagi korban bencana kebakaran, Pemberian intensif kepada anak-anak berprestasi di desa Boneposi, Pembangunan kelas tambahan di SD Boneposi, Pemberian penghargaan kepada guru-guru di SD Boneposi, pembuatan jaringan pipa air bersih untuk warga desa Rantebala. Selain itu PT.MDA telah mengeluarkan dana sebagai kewajiban keuangan sebagaimana diatur dalam KK sebesar Rp.13.289.848.790,- dengan perincian sebagai berikut;

Tabel; kewajiban keuangan yang telah dikeluarkan PT. MDA

Jenis Kewajiban	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Dead Rent	66.909.391	75.365.385	82.390.640	94.964.025	94.254.500	413.883.941
PBB	65.251.455	69.849.060	67.524.051	89.512.995	98.139.800	390.277.361
PPh	1.996.129.340	2.984.806.995	2.415.332.765	89.582.597	82.532.347	7.568.384.044
PPN						4.917.303.444
GRAND TOTAL						13.289.848.790

c. PT. Citra Palu Minerals

- Status perijinan Kontrak Karya (KK) Generasi VI Surat Persetujuan No. B-143/Pres/3/ 1997 pada tanggal 17 Maret 1997. Dan telah memperoleh Perpanjangan Ketiga Tahap Studi Kelayakan sesuai Keputusan Menteri ESDM No.482.K/30/DJB/2016 pada tanggal 26 Oktober 2016.
- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 482.K/30/DJB/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, wilayah Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals (PT.CPM) menjadi 5 Blok terpisah dengan total luas 85.180 Ha atau menjadi 15,2% dari 561.050 Ha luas semula Kontrak Karya. Lokasi daerah penyelidikan PT.CPM terletak di Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli dan Kota Palu) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara).

Tabel; lokasi wilayah KK PT. CPM

Blok	Kabupaten/Kota	Luas (ha)
I	Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala & Kab. Parigi Moutong	27.214
II	Kab. Luwu Utara	23.694
IV	Kab. Toli-Toli & Kab. Parigi Moutong	11.770
V	Kab. Parigi Moutong	12.118
VI	Kota Palu, Kab. Donggala & Kab. Parigi Moutong	10.384
Total		85.180

Sumber: Keputusan Menteri ESDM No. 482.K/30/DJB/2016

- Kegiatan PT. CPM berupa penambahan data – data penunjang Studi Kelayakan dan Studi AMDAL di Blok I Prospek Poboya. Pekerjaan yang dilakukan di Blok I Poboya tahun 2016 meliputi evaluasi hasil dari penentuan parameter sifat fisik, massa batuan dan geomekanika batuan utuh hasil pengujian laboratorium, uji metalurgi, dan survey topografi di wilayah rencana tambang *River Reef* Poboya. Selain itu, penyusunan dokumen AMDAL yang telah dilakukan di Blok I Poboya pada tahun 2016 meliputi pengumuman media, konsultasi publik dan penyusunan Kerangka Acuan (KA).
- Khusus untuk Blok II yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di HL (13,11%), HPT (81,53%) dan APL (5,36%). Adapun kondisi morfologi di Blok II berupa pegunungan dengan kemiringan lereng landai-curam dengan ketinggian antara 1.250 –2.400 m dpl. Adapun kegiatan PT. CPM yang telah dilakukan meliputi Pemetaan geologi Pengambilan contoh batuan dan *stream sediment* dan interpretasi geofisika magnetik udara. Rencana kegiatan PT. CPM dalam mengembangkan prospek di Blok II meliputi:
 - Pengeboran sebanyak 5 titik bor @ 300 m dengan total 1.500 m.
 - *Trenching* (paritan) sebanyak 3 buah
 - Sumur uji sebanyak 9 buah.
 - Lintasan survei geofisika sebanyak 12 lintasan.

Sedangkan untuk pertambangan yang terkait pemenuhan bahan baku semen. Dimana khusus untuk PT. Semen Tonasa mempunyai luas lahan pertambangan sebesar 500 Ha, dengan kapasitas produksi 5,980 juta ton pertahun (Tonasa 2 (590rb ton/thn), Tonasa 3 (590rb ton/thn), Tonasa 4 (2,3 Juta ton/thn), Tonasa 5 (2,5 Juta ton/thn)) dan dapat dimaksimalkan hingga 7 juta ton pertahun. Selain itu PT. Semen Tonasa menghadapi permasalahan sulitnya memperoleh pasokan batubara dan mendorong agar produksi batubara nasional hendaknya dapat diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

4.2. Sektor Lingkungan Hidup dan CSR

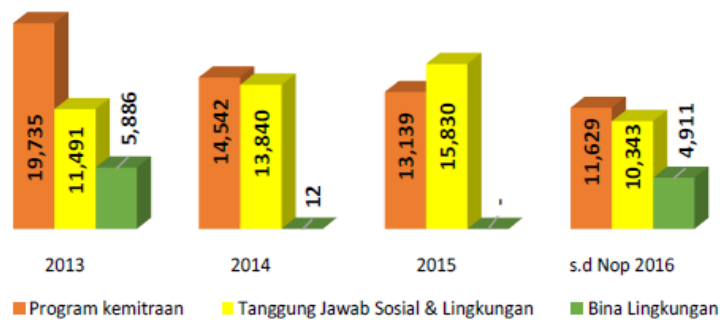
Beberapa informasi yang diperoleh di sektor Lingkungan Hidup oleh tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, antara lain:

- Dalam pengelolaan lingkungan PT. Bosowa Energy (PLTU Jeneponto) telah mempunyai perijinan yang terdiri dari Amdal/Ijin Lingkungan, ijin TPS Limbah B3, ijin pengangkutan limbah, dan ijin pemanfaatan limbah. Terkait hasil pemantauan limbah cair untuk parameter pH, Salinitas, temperatur, Free Chlorine (CL2), tembaga, besi, dan TSS secara keseluruhan masih dibawah baku mutu. Namun pada titik pemantauan di air bahang/outfall parameter CL2 pada bulan juli mencapai 0,52 mg/l atau melampaui baku mutu. Dan pada titik pemantauan di Coal Pond dari bulan Juli-nopember telah melampaui baku mutu pH (derajat keasaman)
- Berdasarkan hasil laporan oleh P3E Sulawesi dan Maluku dengan mengacu pada Balai POM, Balitbang Budidaya Air Payao Maros (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan BLH Provinsi Sulawesi selatan terkait kasus keracunan kerang di perairan desa Mallasuro, Kecamatan Bangkala di Kabupaten Jeneponto disebutkan bahwa ditemukan beberapa logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan Cadmium (Cd) dengan konsentasi yang melampaui baku mutu yang dipersyaratkan kecuali Cadmium (Cd), sedang dalam kerang yang dikonsumsi secara kualitatif ditemukan As (Arsen) CN⁻ (Sianida), namun kadarnya tidak diketahui karena tidak dilakukan analisis kuantitatif. Selain itu hasil analisis laboratotium menunjukkan senyawa fosfat dan bahan organik total (BOT) dari 7 titik pantau melampaui baku mutu yang dipersyaratkan untuk biota dan perairan laut.
- PT. Semen Tonasa dalam melakukan pengelolaan limbah padat, secara berkala (per triwulan) melaporkan ke Gubernur Sulawesi selatan dan melakukan pengujian limbah B3 ke Balai besar K3 Makassar. Pelaporan pengelolaan limbah B3 internal berupa pelumur & oli bekas, fly ash & bottom Ash, Aki bekas dan Fire briks bekas. Sedangkan limbah B3 eksternal berupa Copper Slag dan Sludge Ipal. Sedangkan pemanfaatannya diperuntukkan untuk;

Tabel; Jenis limbah dan pemanfaatannya

Jenis Limbah	Tempat Pemanfaatan	Fungsi/ Sifat Pemanfaatan
Oli/Pelumas bekas	Kiln, alat transport & unit penambangan	Alternatif Fuel
Fly Ash	Penggilingan semen	Alternatif Raw Material
Bottom Ash	Penggilingan semen/Crusher clay	
Copper Slag	Penggilingan bahan mentah	
Sludge IPAL PT. Sermani & PT. KIMA	Pemecah tanah liat	

- PT. Semen Tonasa menyalurkan dana CSR dalam bentuk Program Kemitraan, Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan dan Bina Lingkungan.



Gambar. Realisasi penyaluran CSR PT. Semen Tonasa

Hingga Nopember 2016 dana CSR yang telah disalurkan sebesar Rp. 26, 883 miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp.37,112 miliar. Khusus terkait penurunan program kemitraan dikarenakan PT. Semen Tonasa tidak lagi menyalurkan program pinjaman dengan bunga 6% karena adanya Permen BUMN tahun 2015 yang melarang pemberian pinjaman untuk program kemitraan.

- Adapun pencapaian pengelolaan lingkungan yang telah dicapai oleh PT. Semen Tonasa, adalah;

Tabel; Pencapaian pengelolaan Lingkungan PT. Semen Tonasa

URAIAN	PENCAPAIAN (Basis tahun 2011)
Efisiensi Energi Panas	1207 MJ/t-clinker (25,8%)
Efisiensi Energi Listrik	5,2 Mjoule/ton semen ekuivalen (1,48%)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	48 kgCO ₂ /t-cementitious (6,5%)
Efisiensi Pemakaian Air	34 %
Kenaikan Pemanfaatan Limbah B3	36 %
Penurunan Produksi Limbah Padat non B3	21%
Program Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Budidaya pohon endemic (Bitti) ➢ Pengembangan teknologi isomik di lahan bekas tambang ➢ Pencetakan Sawah pada lahan tidak produktif dan bekas penambangan tanah liat
Program CSR Berkelanjutan	Tonasa Cerdas, Tonasa Peduli, Tonasa Sehat, Tonasa Bersahaja & Tonasa Hijau, program tersebut meliputi Program Mandiri usaha mikro dan kecil (UMK) , Bedah Rumah Kami , Sekolah Impian , Bank Sampah , Asuh Anak Dhuafa , Tonasa Mengajar .

4.3. Sektor Riset dan Teknologi

Di bidang pengembangan Riset dan Teknologi, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong pengembangan riset dan teknologi berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh daerah. Pada pelaksanaan Kunjungan kerja tersebut, berhasil ditandatangani MoU antara Pemda Kabupaten Jeneponto dengan LIPI untuk pengemasan produk turunan lontar dan kerjasama dibidang pertanian, perikanan/kelautan, peternakan dan pengembangan SDM dibidang IPTEK. Selain itu BPPT juga telah melakukan pelatihan makro industri di Pesantren Babussalam dan berkomitmen untuk membantuk para petambak garam. Hal ini sejalan dengan program BPPT yang sedang mengembangkan garam farsmasi.

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari serangkaian pertemuan dengan berbagai mitra terkait yang dilakukan oleh tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Rasio Elektrifikasi untuk wilayah Sulawesi selatan sebesar 94,10%, Sedangkan daya terpasang sebesar 1.335,0 MW, dengan daya mampu 1.101,5 MW, dan beban puncak sebesar 1.012,8 MW. Sehingga masih terdapat surplus sebesar 88,7 MW. Namun jumlah cadangan yang dimiliki

- masih <30% sehingga relatif belum aman untuk menghindari terjadinya pemadaman jika terjadi kerusakan pada pembangkit
- Biaya pokok Penyediaan (BPP) untuk wilayah Sulselrabar masih lebih tinggi dari harga jual rata-rata. Per-nopember 2016, BPP mencapai Rp.1.431 per kWh sedangkan harga jual rata-rata mencapai Rp. 955 per kWh. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 476 per kWh. Ini berarti masih terjadi ketidak efisienan didalam pengelolaan ketenagalistrikan khususnya di wilayah Sulselrabar.
 - Realisasi Lides untuk wilayah Sulselrabar per oktober 2016 yang terdiri dari pembangunan Gardu Induk, JTM, JTR masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 139.481.809.499,- atau baru mencapai 40,70% dari komitmen kontrak sebesar Rp. 342.736.133.968,- sehingga diperlukan upaya yang maksimal agar penyelesaian program Lides dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.
 - Ketersediaan BBM dan LPG PSO maupun non PSO untuk wilayah Sulawesi selatan hingga oktober tahun 2016 realisasinya masih dibawah quota yang telah ditetapkan dan di prediksi hingga berakhirnya tahun 2016 pemenuhan BBM dan LPG di Sulawesi selatan masih dapat tercukupi.
 - Dalam hal mensuplai BBM di wilayah Sulawesi, PT. Pertamina (Persero), menghadapi tantangan diantaranya adalah faktor medan distribusi yang menantang dimana jarak tempuh sampai dengan 450 km dengan jalan berluk dan berbukit. Selain itu potensi longsor di perjalanan dapat menghambat kelancaran pendistribusian. Kendala lainnya adalah masalah alam dimana pendistribusian BBM dengan menggunakan moda transportasi laut terkadang terkendala oleh pengaruh cuaca, seperti ketinggian ombak yang mencapai 2 meter.
 - Produksi Gas di Sulawesi Selatan yang dihasilkan oleh PT. Energy Equity Epic Sengkang (PT.EEES) hingga oktober 2016 rata-rata sebesar 43,26 Mmscfd, adapun pemanfaatannya hingga oktober 2016 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan listrik sebesar 59 BBTUD dan Jaringan Gas Kota sebesar 0,5 BBTUD.
 - Pada sektor pertambangan, kendala yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya menyangkut masalah Pelepasan hak kepemilikan lahan yang masuk dalam WIUP, Proses perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan jangka waktu IUP, .masalah Lokasi WUP yang tumpang tindih dengan sektor lain, rendahnya penataan terhadap UU oleh para pemegang IUP, adanya pasal didalam UU Minerba yang bertentangan dengan UU No 32 tahun 2014 tentang Pemda dan belum selesainya revisi UU Minerba, serta keberadaan Pengawasan Tambang kurang efektif karena status kepegawaian Inspektur Tambang belum jelas dari Pemerintah Pusat.
 - Terkait rencana pemberian relaksasi eksport, PT. Vale Indonesia menganggap justru akan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Diperkirakan jika tanpa pemberian relaksasi pada tahun 2017, penerimaan

- negara mencapai U\$D 2,20 miliar, namun jika relaksasi diberikan namun tidak berpengaruh pada harga nikel maka penerimaan negara hanya mencapai U\$D 1,99 miliar dan jika relaksasi dan ada pengaruh pada harga nikel maka penerimaan negara mencapai U\$D 1,45 miliar
- PT. Masmindo Dwi Area (PT.MDA) merupakan perusahaan pemegang KK generasi VII, berdasarkan Kepres No. B.53/Pres/1/1998 pada tanggal 19 Januari 1988, baru akan merencanakan kegiatan konstruksi pada tahun 2018. Sedangkan untuk PT. Citra Palu Minerals yang merupakan perusahaan Kontrak Karya (KK) Generasi VI berdasarkan Surat Persetujuan No. B-143/Pres/3/ 1997 pada tanggal 17 Maret 1997, konsentrasi kegiatan usaha pada blok yang berada di wilayah Sulawesi tengah sedangkan untuk blok yang berada di wilayah Sulawesi selatan progressnya baru melaksanakan kegiatan Pemetaan geologi Pengambilan contoh batuan dan *stream sediment* dan interpretasi geofisika magnetik udara.
 - Kegiatan operasi PT. Semen Tonasi terkendala dikarenakan sulitnya memperoleh pasokan Batubara, mengingat sebagian besar produsen batubara lebih cenderung melakukan ekspor dibandingkan menjual ke industri di dalam negeri.
 - Berdasarkan hasil laporan oleh P3E Sulawesi dan Maluku terkait kasus keracunan kerang di perairan desa Mallasuro, Kecamatan Bangkala di Kabupaten Jeneponto disebutkan bahwa ditemukan beberapa logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan Cadmium (Cd) dengan konsentrasi yang melampaui baku mutu yang dipersyaratkan kecuali Cadmium (Cd), sedang dalam kerang yang dikonsumsi secara kualitatif ditemukan As (Arsen) CN⁻ (Sianida), namun kadarnya tidak diketahui karena tidak dilakukan analisis kuantitatif. Selain itu hasil analisis laboratorium menunjukkan senyawa fosfat dan bahan organik total (BOT) dari 7 titik pantau melampaui baku mutu yang dipersyaratkan untuk biota dan perairan laut.
 - Kementerian Ristek dan Dikti diharapkan semakin meningkatkan kegiatan pengembangan riset dan teknologi berbasis sumberdaya lokal agar mampu memberi nilai tambah dan pada gilirannya menumbuhkan perekonomian daerah tersebut.

5.2. Saran

Adapun saran-saran, sebagai hasil Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

- Mengusulkan untuk diagendakan RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirut PT. PLN (Persero) menyangkut perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) ketenagalistrikan khususnya kawasan timur Indonesia

- Mengusulkan untuk diagendakan RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI menyangkut rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral
- Terkait kasus keracunan kerang di perairan desa Mallasuro, Kecamatan Bangkala di Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan audit lingkungan terhadap PLTU Punagaya dan mendorong BPPT untuk melakukan kajian lingkungan secara komprehensif menyangkut penyebab terjadinya pencemaran di perairan desa mallasuro kabupaten jenepono.

BAGIAN VI

PENUTUP

Demikian Laporan tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2016. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI untuk berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Jakarta, Desember 2016
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
Ketua,

H. Gus Irawan Pasaribu, SE,Ak., MM,CA.